

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari relasinya yang intens dengan orang lain. Fakta ini mengindikasikan kodrat manusia yang selalu memiliki kerinduan untuk bersosialisasi dan mengembangkan diri dengan orang lain. Dimensi sosialitas manusia tidak pernah bersifat statis melainkan selalu dinamis dan dibarengi dengan semua perkembangan yang turut membingkai semua tetek bengkek kehidupan itu sendiri. Kendatipun demikian relasi resiprokal yang diidealkan selalu kompleks karena horizon yang menjadi latar belakang manusia tidak pernah bersifat tunggal melainkan hasil integrasi antara budaya, agama, suku, ras dan pengetahuan. Di dalam konteks ini keberagaman adalah sebuah keniscayaan dan harus ada dalam basis konseptual setiap manusia agar perbedaan dikonstruksi sedemikian rupa dan menjadi landasan yang mengedepankan kemanusiaan bukan sebaliknya.

Kendatipun Bhineka Tunggal Ika menjadi imajinasi politik yang berusaha mendamaikan realitas Indonesia yang plural tetapi toh Indonesia selalu berusaha menemukan bahasa lain atau alternatif *language* untuk meredam potensi konflik, misalnya rumusan kelima sila dalam tubuh Pancasila. Pluralitas horizon akan selalu berpotensi menghasilkan konflik ketika kepentingan-kepentingan partikular tidak dijumpai dengan baik. Ketika persoalan ini dikonfrontasikan dengan situasi di Indonesia, konflik horizontal turut menghasilkan sejarah yang buruk ketika perbedaan dan keberlainan dimengerti secara sempit.

Dalam sejarah bangsa Indonesia khususnya di bawah rezim Soeharto, term pluralitas tidak diberi tempat melainkan didepak agar kekuasaan *status quo* tetap langgeng. Selama 32 tahun hidup bangsa Indonesia di bawah satu rezim politik yang memiliki kecenderungan mendasar untuk menyeragamkan segala sesuatu. Perbedaan dipandang sebagai sesuatu yang mengancam. Keharmonisan ditafsir dan dijadikan landasan untuk politik uniformisasi. Melalui sentralisasi sistem pendidikan, kontrol atas media massa dan promosi apa yang disebutkan sebagai

kebudayaan nasional, terjadi penyeragaman yang sangat kuat, yang mencurigai segala sesuatu yang bersikap dan bersuara lain.¹ Ketika rezim yang berusaha mempromosikan politik keseragaman ini runtuh, angin segar bagi tumbuhnya pluralitas kian kencang. Di sinilah konteks Indonesia sebagai negara yang multikultural mulai menampakkan diri karena perbedaan diakomodasi dengan cara-cara baru. Kendatipun persoalan ini merupakan produk politik, tetapi secara sosio-kultural keberlainan atau pluralitas dipangkas untuk mendapatkan garansi kekuasaan yang absolut.

Sebagian besar realitas atau fakta kekerasan akibat perbenturan konseptual tentang perbedaan atau pluralitas merupakan akumulasi fakta historis yang menggema dalam seluruh perjalanan peradaban manusia. Artinya bahwa konflik akibat fakta pluralitas bukan melulu masalah kontemporer melainkan masalah yang dibatinkan oleh manusia berabad-abad yang lalu. Fakta ini bisa dilacak dalam sejarah kalam negara Jerman ketika Adolf Hitler dan partai nazi yang ia pimpin menguasai negara dengan sistem kediktatoran sebagai instrumen dalam melanggengkan kekuasaan (1933-1945). Ia ditunjuk menjadi Kanselir Jerman oleh Presiden Republik Weimar, Paul Von Hindenburg pada tanggal 30 Januari 1933. Mereka kemudian melenyapkan semua lawan politik untuk memperkuat kekuasaan. Ketika Hindenburg wafat pada 2 Agustus 1934, Hitler kemudian menjadi diktator Jerman dengan menggabungkan jabatan Kanselir dan Presiden. Sentralisasi kekuasaan membuat resistensi seorang diktator sangat kuat sehingga propaganda rasisme terutama antisemitisme menjadi bagian dari ideologi yang menganggap bangsa Jerman sebagai ras unggul dan berusaha untuk mendepak ras Arya. Diskriminasi dan persekusi menjadi jalan terakhir dalam menyingkirkan orang Yahudi hingga terjadi pembantaian yang kejam di kamp-kamp konsentrasi.²

Semua peristiwa di negara mana pun tidak bisa lihat dalam konteks yang sangat sempit artinya dari peristiwa di Indonesia terbuka kemungkinan untuk melihat persoalan yang terjadi di negara lain. Pengaruh peristiwa di negara lain akibat ideologi tertentu atau pergolakan politik tertentu serentak menjiwai

¹ Paul Budi Kleden, "Berfilsafat dan Berteologi di Indonesia" *Jurnal Ledalero*, 18:2 (Mauwere: Desember 2019), hlm.156.

² https://id.m.wikipedia.org/wiki/jerman_Nazi, diakses pada 20 April 2023.

pergolakan politik akibat ideologi tertentu di negara Indonesia. Meskipun peristiwa Holocaust di Jerman tidak sama persis terjadi di Indonesia tetapi gejala yang muncul hampir sama terjadi di Indonesia di mana pemimpin yang otoriter membungkam kemanusiaan dengan upaya penyeragaman dan mencekik suara-suara yang berusaha melawan kebijakan strategis untuk melanggengkan *status quo*. Aspek inklusivitas terutama kekuatan dari persoalan internasional perlahan-lahan merasuk dan diadopsi sedemikian rupa sehingga Soeharto membungkam perbedaan pandangan yang berlawanan dengannya.

Sejarah bangsa Indonesia pasca orde baru mengalami instabilitas di bidang politik dan sosio-kultural. Badan Pusat Statistik yang merilis data pada 2010, menyebutkan bahwa ada 1.128 suku di Indonesia yang tersebar di lebih dari 17 ribu pulau di Indonesia. Kendatipun demikian, realitas perbedaan tersebut melahirkan konflik yang tidak hanya mengorbankan materi tetapi juga menghilangkan nyawa ratusan orang. Tragedi tersebut di antaranya adalah konflik 1998 yang menjadikan warga etnis Tionghoa sebagai korban pelecehan dan pemerkosaan, tragedi Sampit yang menghadirkan konflik antara kelompok etnis Dayak dan Madura pada 18 Februari 2001, dan konflik Maluku yang disulut oleh masalah perbedaan agama antara kelompok Kristen dan Islam.³ Masalah seputar keberagaman akhirnya menjadi perhatian global dan melalui resolusi nomor 57/249 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan 21 Mei sebagai Hari Dialog dan keberagaman pada 2002. Peringatan ini lahir ketika UNESCO mengeluarkan Deklarasi Universal tentang keberagaman budaya. PBB mencatat bahwa sebanyak 75 persen dari konflik besar yang terjadi di belahan dunia saat ini berakar pada dimensi kultural.⁴

Dalam konteks agama, Indonesia adalah salah satu negara yang sangat plural dan melegitimasi realitas ini dalam sila yang pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Kendatipun demikian kehadiran agama-agama di Indonesia tidak hanya mengekalkan hubungannya dengan yang transenden tetapi di sisi lain

³ Maria Rita Hasugian, Konflik yang Dipicu Keberagaman Budaya Indonesia dalam <https://nasional.tempo.co/read/668047/konflik-yang-dipicu-keberagaman-budaya-indonesia>, diakses pada 20 April 2023.

⁴ *Ibid.*

agama seringkali diinstrumentalisasi dan dipolitisasi demi kepentingan partikular kelompok tertentu. Fakta tentang fundamentalisme agama telah menghadirkan intoleransi antara umat beragama dengan mengklaim agama sendiri lebih baik daripada agama lain. Menurut M. A. Mohamed Salih sebagaimana yang dikutip oleh F. Budi Hardiman, ada kecenderungan yang sangat kuat di antara umat beragama untuk menentang analisis sosial-historis atas isi Kitab Suci mereka, karena mereka bersifat “ilahi, abadi dan melampaui batas kemampuan manusiawi untuk menentukan apa yang telah diwahyukan oleh Allah”⁵. Dalam artian yang sederhana wahyu dilegitimasi sebagai yang absolut dan serentak menganggap interpretasi juga sebagai yang absolut. Seringkali tendensi untuk menghadirkan wajah Agama yang bengis tidak terelakkan ketika rasionalitas dikebiri dan orang mengandalkan sentimen-sentimen yang berpotensi melahirkan konflik. Dalam konteks politik, agama seringkali diinstrumentalisasi dan dipolitisasi untuk kepentingan kelompok tertentu serta melanggengkan kekuasaan. Ambivalensi agama tidak terhindarkan ketika tidak ditopang oleh basis rasionalitas. Jalan terjal yang ditempuh dalam konteks seperti ini adalah pentingnya dialog antara agama. Hal ini sangat penting dan urgen terutama untuk menjembatani setiap perbedaan dan pluralitas yang ada.

Di sisi lain, di tengah kegelisahan nasional bahkan global terutama konflik-konflik yang begitu masif, pluralitas merupakan faktum historis yang memperlihatkan dimensi paling substansial dalam realitas perkembangan hidup manusia. Di dalam konteks global, sejarah membuktikan bahwa manusia telah bermigrasi, berdagang, menaklukkan, mencari perdagangan dan berinteraksi dengan budaya lain. Hal ini cukup kuat ketika periode kolonial semakin meningkatkan kontak antara bangsa-bangsa, karena kekuatan besar dari negara-negara Eropa seperti Inggris, Belanda, Prancis, Spanyol dan Portugis mendirikan koloni di seluruh wilayah asia pasifik yang tidak hanya membawa pengaruh bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat tetapi seringkali mendominasi dan

⁵ F. Budi Hardiman, *Seni Memahami Hermeneutika dari Schleiermacher sampai Derrida* (Yogyakarta: Kanisius, 2015), hlm. 22.

menggusur budaya asli dan lokal serta memaksakan struktur sosial-budaya, agama, politik mereka, ekonomi dan bahasa pada penduduk lokal.⁶

Ketika kemajuan di bidang teknologi sangat masif hari-hari ini, proses peleburan budaya itu sendiri mengalami transformasi yang sangat serius. Cara-cara lama dan sangat konvensional kini hanyalah bagian dari masa lalu yang semakin hari dipertanyakan relevansinya karena prinsip kebaruan menjadi standar bagi proses kemajuan dalam segala hal. Hanya ketika memberi pemahaman yang komprehensif terhadap realitas tersebut, manusia mampu melegitimasi faktum pluralitas sebagai momentum untuk mempromosikan cita rasa kemanusiaan universal, karena di sana ada pengakuan akan martabat manusia yang luhur. Axel Honneth menjelaskan tentang pengakuan intersubjektif menjadi syarat mutlak bagi formasi identitas. Relasi intersubjektif memungkinkan kehidupan sosial terjadi di bawah imperatif pengakuan timbal balik, sebab subjek-subjek hanya mampu menggapai pemahaman diri yang praktis (etis) jika belajar melihat diri mereka dari sudut pandang normatif partner interaksi sebagai tujuan relasi sosial.⁷

Kendatipun demikian, dalam basis teoretis atau konseptual, paradigma berpikir masyarakat pada umumnya hanya berkutat pada term multikultural. Paradigma berpikir seperti ini hanya menekankan proses pengakuan terhadap perbedaan dan kurang berdampak pada transformasi sosial. Fakta tentang perbedaan tidak hanya terbatas pada persoalan pengakuan tetapi bagaimana perbedaan itu dikomunikasikan sedemikian rupa sehingga melahirkan proses dialog antar budaya. Penulis melihat paradigma atau *forma mentis* untuk menanggapi fakta perbedaan harus ditopang oleh suatu *forma mentis* alternatif yaitu paradigma interkultural.

The theme of intercultural understanding and respect for cultural diversity falls within the social dimension of peace, equality and human rights, underpinned by the cultural context, within and through which learning occurs, and which forms the basis for inter-linkages between the various sustainability dimensions (i.e., socio-political, environmental and economic). Within the

⁶ Joy de Leo, *Reorienting Teacher Education to Address Sustainable Development: Guidelines and Tools. Education for Intercultural Understanding* (Bangkok: UNESCO, 2010), hlm. 6.

⁷ Otto Gusti Madung, "Pluralitas dan Konsep Pengakuan Intersubjektif dalam Pemikiran Axel Honneth" *Diskursus*, 13: 2, (Jakarta, Oktober 2014), hlm. 10.

*International Implementation Scheme, the value of respect is seen as central to all aspects of sustainable development: respect for self, for others and for all life on earth.*⁸

Paradigma interkultural menawarkan sebuah model pendekatan yang transformatif yang tidak hanya merujuk pada basis konseptual tetapi juga mendamaikan fakta sosial yang plural dan berpotensi melahirkan konflik. Interkulturalisme adalah gerakan politik yang mendukung dialog lintas budaya dan menantang kecenderungan pemisahan diri dalam budaya.⁹ Fakta sosial tentang keberagaman memungkinkan adanya garansi untuk membentuk komunitas dan mempertahankan nilai-nilai atau spiritualitas yang menjadi konsensus kolektif agar kebersamaan bertumbuh sesuai dengan harapan sebuah komunitas tersebut. Kendatipun demikian ketika konsesus dibatinkan secara radikal maka tendensi untuk mengekalkan etnosentrisme sangat mungkin terjadi. Alih-alih menjaga kearifan budaya sendiri, orang seringkali terjebak dalam konsekuensi cara berpikir tentang anggapan bahwa budaya sendiri lebih baik sedangkan budaya lain tidak baik. Kategorisasi seperti ini memungkinkan konflik bisa terjadi karena konstruksi berpikir yang berlandaskan prasangka-prasangka yang sangat dangkal.

Interkulturalisme melibatkan lebih dari sekadar penerimaan pasif terhadap berbagai budaya yang ada di dalam masyarakat, tetapi juga mempromosikan dialog dan interaksi antar budaya.¹⁰ Pada tataran ini dimensi sosialitas manusia tidak hanya direduksi ke dalam relasi-relasi sosial biasa tetapi harus melewati satu jalan perjuangan yakni membagikan kekayaan budaya tertentu kepada orang lain. Hanya dengan membagikannya kepada orang lain, dialog dan komunikasi yang bersifat resiprokal bisa terjadi. Di sisi lain interkulturalisme muncul sebagai tanggapan atas kritik terhadap kebijakan multikulturalisme yang ada, seperti kritik

⁸ Penulis menerjemahkannya demikian: tema pemahaman antarbudaya dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya termasuk dalam dimensi sosial perdamaian, kesetaraan dan hak asasi manusia, yang ditopang oleh konteks budaya, di dalam dan di mana pembelajaran terjadi, dan yang menjadi dasar keterkaitan antara berbagai dimensi keberlanjutan (yaitu sosial-politik, lingkungan, dan ekonomi). Dalam Skema Implementasi Internasional, nilai rasa hormat dipandang sebagai pusat dari semua aspek pembangunan berkelanjutan: rasa hormat terhadap diri sendiri, orang lain, dan semua kehidupan di bumi. Joy de Leo, *op.cit.*, hlm. 1.

⁹ John Nagle, Multiculturalism's Double-Bind: Creating Inclusivity Cosmopolitanism and Difference, dalam <https://en.wikipedia.org/wiki/Interculturalism>, diakses pada 24 April 2023.

¹⁰ Ibanez B. Penas, Ma. Carmen López Sáenz. "Interculturalism: Between Identity and Diversity. Bern: Peter Lang AG", dalam <https://en.wikipedia.org/wiki/Interculturalism>, diakses pada 24 April 2023.

bahwa kebijakan tersebut gagal menciptakan inklusi budaya yang berbeda di dalam masyarakat, tetapi justru memecah belah masyarakat dengan melegitimasi komunitas-komunitas yang terpisah yang mengisolasi diri mereka sendiri dan menekankan kekhususan mereka.¹¹

Persis dalam situasi ini paradigma interkultural sebagai sebuah paradigma alternatif sangat penting dan urgen. Kebersamaan akan bertumbuh jika kesadaran tentang perbedaan ditopang oleh konsep dan pemahaman yang konstruktif. Cita rasa kemanusiaan hanya mampu diekspresikan di ruang publik jika manusia mengaktifkan dimensi sosial dalam dirinya dan membangun persahabatan yang intens dengan yang lain. Konsep hidup yang baik hanya bisa dimengerti dalam konteks perjuangan untuk membangun persahabatan dengan orang lain, mencintai kehidupan dan mengejar kebaikan bersama dengan orang lain.¹² Paradigma interkultural tidak hanya mempersatukan perbedaan pandangan hidup, tetapi mentalitas interkultural harus dibatinkan dan harus dinternalisasi agar kesadaran akan pluralitas tetap utuh dan tidak bersifat temporal.

Kendatipun demikian usaha untuk memahami paradigma interkultural belum cukup memadai, oleh karena itu posisi interkultural sebagai *forma mentis* atau cara pandang baru dalam membaca realitas harus didukung oleh tokoh atau figur yang telah menghidupkan dan membatinkan *forma mentis* itu dalam seluruh realitas hidupnya. Tokoh yang dimaksudkan adalah rasul Paulus. Rasul Paulus merupakan salah satu tokoh yang hidup dan dibesarkan dalam tiga budaya sekaligus yakni Yudaisme, Helenisme, dan Romawi. Pada masa mudanya ia berguru kepada Gamaliel di Yerusalem dalam metode teologi kaum Farisi dan Hukum Taurat dan Paulus setuju peristiwa perajaman Stefanus dan sesudah itu ia sendiri menjadi penganiaya orang Kristen.¹³ Paulus merupakan seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan yang baik, bahkan pendidikan teologi Yahudi yang diperolehnya menjadi teolog ulung dan pertama dalam kekristenan di kemudian hari. Dalam misinya ia berusaha menjadi segala-galanya bagi semua

¹¹ Hans van Ewijk. "European Social Policy and Social Work: Citizenship-Based Social Work", dalam <https://en.wikipedia.org/wiki/Interculturalism>, diakses pada 24 April 2023.

¹² Felix Baghi, *Alteritas: Pengakuan, Hospitalitas, Persahabatan (Etika Politik dan Postmodernisme)* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2012), hlm. 85.

¹³ Antonio Camnahas, *Benih Sesawi Menjadi Pohon* (Maumere: Penerbit Ledaleo, 2021), hlm. 38.

orang. Kepada orang kafir ia menjadi sama seperti mereka, kepada orang Yunani ia menjadi orang Yunani dan juga terhadap orang Yahudi.¹⁴

Dalam konteks interkultural, pemetaan tentang realitas dan konteks hidup Paulus bisa menjadi rujukan yang komprehensif untuk memahami kontribusi rasul Paulus dalam mengembangkan *forma mentis* interkultural. Pengalaman hidup dalam tiga kebudayaan yang berbeda memungkinkan rasul Paulus membawa kekristenan keluar dari kungkungan Yudaisme dan mampuewartakan injil. Surat-suratnya yang terkenal misalnya kepada orang-orang Roma, Korintus Galatia, Efesus, Kolose, Tesalonika dan sebagainya, merupakan bukti historis tentang keberanian dan komitmen Rasul Paulus dalam misinya untuk membawa orang ke dalam pelukan kekristenan. Sebelum menjadi tokoh besar dalam sejarah kekristenan, Paulus adalah seorang penganiaya jemaat Kristen hingga perjumpaannya dengan Yesus mentransformasi seluruh dirinya dan menjadi rasul besar yang secara militanewartakan Injil. Karya kerasulan Paulus tidak dapat dipisahkan dari pokok interpretasi teologisnya tentang Injil. Interpretasi tersebut mengekalkan usahanya untuk mempertanggungjawabkan perjumpaannya dengan Kristus dan identitasnya sebagai rasul.¹⁵

Dalam konteks perjuangan rasul Paulus di Galatia, salah satu persoalan serius yang dihadapi adalah perdebatan teologis sosiologis yang menampilkan tuntutan orang Kristen Yahudi kepada orang-orang Kristen non-Yahudi untuk melakukan sunat dan melaksanakan hukum Taurat dengan dalil keselamatan dari Allah. Paulus menegaskan bahwa dalam iman akan Kristus orang-orang Kristen non-Yahudi akan tetap menjadi anak-anak Allah dan memperoleh keselamatan.¹⁶ Kehadiran Paulus di Galatia mencoba untuk menghadirkan satu perspektif bagi orang-orang Kristen Yahudi yang masih terjebak dalam tradisi yang kaku dalam mengerti tentang syarat keselamatan Allah. Universalitas tentang keselamatan Allah tidak dibatasi oleh perkara sunat dan tidak sunat melainkan syarat keselamatan bagi Allah adalah iman yang teguh kepadaNya.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 40.

¹⁵ Tom Jacobs, *Paulus: Hidup, Karya dan Teologinya* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 22.

¹⁶ Samuel Benyamin Hakh, "Persoalan Status Sebagai Anak-Anak Abraham dalam Surat Galatia" *Gema Teologika*, 1:1 (Yogyakarta: April 2016), hlm. 13.

Melalui tulisan ini, penulis ingin menampilkan kepada sidang pembaca tentang bagaimana kekuatan mentalitas interkultural mentransformasi seluruh diri Paulus dalamewartakan Kristus ke berbagai daerah. Paradigma interkultural memungkinkan manusia kerasan dengan realitas plural dan melebur diri untuk menimba pengalaman hidup dan memberi warna bagi orang lain. Kesadaran ekistensial seperti ini berpotensi untuk mengkonstruksi dunia yang penuh makna dan menumbuhkan cita rasa kemanusiaan universal dengan pendekatan-pendekatan yang humanis. Bertolak dari latar belakang di atas, penulis merumuskan karya ilmiah ini dengan judul **“Corak Hidup Interkultural Rasul Paulus dalam Galatia 3: 15-29 dan Implikasinya Terhadap Dialog Antaragama di Indonesia”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam skripsi ini masalah utama yang ingin dibahas adalah bagaimana implikasi corak hidup interkultural rasul Paulus dalam Galatia 3:15-29 untuk mewujudkan dialog antaragama di Indonesia. Dari masalah utama di atas penulis menemukan tiga masalah turunan yang sangat penting dalam pembahasan skripsi ini yakni:

Pertama, bagaimana paradigma interkultural mampu menjadi pandangan alternatif dalam membaca pluralitas serta menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan dialog antaragama di Indonesia?

Kedua, bagaimana komitmen Paulus dalam menghidupi corak hidup interkultural serta melihat konteks hidup serta keyakinan yang menjadi latar belakang hidup jemaat di Galatia, yang terdapat dalam Galatia 3: 15-29?

Ketiga, bagaimana implikasi corak hidup interkultural rasul Paulus dalam Galatia 3:15-29 dalam upaya mewujudkan dialog antaragama di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Umum

Dalam proses menyelesaikan skripsi ini tujuan umum yang ingin dicapai adalah penulis ingin mengetahui sejauh mana implikasi corak hidup interkultural rasul Paulus dalam Galatia 3:15-29 mampu mewujudkan dialog antaragama di Indonesia.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan-tujuan khusus dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Pertama, penulis ingin menjadikan paradigma interkultural menjadi salah satu pandangan alternatif dalam membaca pluralitas serta menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan dialog antaragama di Indonesia.

Kedua, penulis ingin mendalami serta menggali komitmen Paulus dalam menghidupi corak hidup interkultural serta melihat konteks hidup serta keyakinan yang menjadi latar belakang hidup jemaat di Galatia.

Ketiga, penulis ingin memahami lebih jauh tentang implikasi corak hidup interkultural rasul Paulus dalam Galatia 3: 15-29 dalam upaya mewujudkan dialog antaragama di Indonesia.

Keempat, sebagai syarat untuk menyelesaikan program Strata Satu di bidang Filsafat di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.

1.4. Metode Penulisan

Dalam proses penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan melakukan studi kepustakaan untuk menggali sumber-sumber yang valid dan sesuai dengan tema tulisan ini di perpustakaan IFTK Ledalero. Penulis mencari dan mengumpulkan sumber-sumber primer tentang buku yang berkaitan dengan tiga poin penting dalam tulisan ini yakni hidup dan karya Paulus, paradigma interkultural dan tentang dialog antaragama. Penulis juga

mencari sumber-sumber dari pangkalan data internet untuk menyokong argumentasi sehubungan dengan tema tulisan ini serta membaca sumber-sumber lain baik artikel jurnal maupun tulisan-tulisan yang berbicara dan berdiskursus tentang tema tulisan skripsi ini.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam membahas tema tulisan ini, penulis membuat pemetaan dengan membaginya ke dalam lima bab,

Bab pertama: penulis menjelaskan tentang latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab kedua: penulis memaparkan konsep tentang paradigma interkultural sebagai pandangan alternatif dalam membaca pluralitas serta memaparkan tantangan-tantangan yang paling substansial dalam merealisasikan paradigma ini. Di sisi lain penulis juga akan memaparkan konsep-konsep atau term-term yang berbicara tentang budaya serta mengemukakan alasan tentang paradigma interkultural sebagai basis argumentasi dalam mengatasi konflik karena faktum pluralitas.

Bab ketiga: Penulis mengkaji komitmen Paulus dalam menghidupi corak hidup interkultural serta melihat konteks hidup serta keyakinan yang menjadi latar belakang hidup masyarakat Galatia. Di sisi lain penulis mencoba menginterpretasi teks Galatia 3: 15-29 terutama untuk menggali informasi tentang situasi sosio-kultural saat itu.

Bab keempat: penulis memaparkan implikasi corak hidup interkultural Rasul Paulus dalam membaca pluralitas di Indonesia khususnya pluralitas agama serta megemukakan alasan tentang pentingnya dialog antaragama di Indonesia.

Bab kelima: Penulis membuat kesimpulan dari seluruh pembahasan tulisan ini serta membuat catatan kritis terutama dengan temuan-temuan penulis sehubungan dengan tema tulisan yang ada.